

**IMPLEMENTASI PEDOMAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIKA SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN RESISTENSI ANTIBIOTIK BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DI RSUD ULIN
BANJARMASIN**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S2

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum Kesehatan

diajukan oleh

Munawaroh Pasaribu

NIM. 21.C2.0082

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

ABSTRAK

Resistensi antimikroba dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas pada pasien dan merupakan permasalahan dunia. Upaya pemerintah dalam pengendalian resistensi antimikroba dengan mengeluarkan berbagai regulasi dan yang terakhir Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Antibiotika. RSUD Ulin Banjarmasin adalah RSUD di Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan rumah sakit rujukan puncak di Kalimantan Selatan dan Kalimantan tengah.

Metode Penelitian yakni penelitian yuridis sosiologis, dengan pendekatan ilmu sosial dalam memahami dan menganalisis hukum yakni sejauh mana gejala yang ada dalam masyarakat mempengaruhi hukum dan sebaliknya.

Hasil Penelitian menunjukkan substansi PPRA di RSUD Ulin Banjarmasin telah mengacu pada peraturan yang berlaku yang dimulai dengan proyek percontohan (KSM Penyakit Dalam). Pada awal pelaksanaan terdapat perbaikan kuantitas penggunaan antibiotika dan perbaikan kualitas penggunaan antibiotik. Faktor pendukung dalam pelaksanaannya terkait pembuatan kebijakan, SDM dan fasilitas RSUD. Ulin sebagai RS Tipe A. Hambatan terutama komitmen dan pemahaman dalam penggunaan antibiotika serta pihak manajemen dalam hal dukungan dan peran aktif.

Kesimpulan pengaturan PPRA di RSUD Ulin Banjarmasin telah mengacu pada peraturan yang berlaku dalam UUD 1945, berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Kesehatan, dan peraturan teknis berupa peraturan menteri kesehatan. Perlu evaluasi dan revisi mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2021 tentang Panduan Penggunaan Antibiotika. Implementasi masih belum perlu optimal sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan berkelanjutan dan terus menerus. Manajemen perlu berperan aktif dalam pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPRA, memenuhi sarana dan prasarana baik yang memadai.

Kata Kunci: resistensi antimikroba, pengendalian resistensi antimikroba, panduan penggunaan antibiotika, implementasi kebijakan

ABSTARCT

Antimicrobial resistance can increase morbidity and mortality in patients and is a global problem. The government's efforts to control antimicrobial resistance by issuing various regulations and the latest PMK NO. 28 of 2021 concerning Guidelines for the Use of Antibiotics. Ulin Banjarmasin Hospital is a hospital in South Kalimantan Province which is the top referral hospital in Kalimantan, Selalatan and Central Kalimantan.

Research Methods is sociological juridical research, with a social science approach in understanding and analyzing the law, namely the extent to which the symptoms that exist in society affect the law and vice versa.

The results of the study show that the substance of PPRA at Ulin Banjarmasin Hospital has referred to the applicable regulations that began with a pilot project (KSM Internal Medicine). At the beginning of the implementation, there was an improvement in the quantity of antibiotic use and an improvement in the quality of antibiotic use. Supporting factors in its implementation are related to policy making, human resources and hospital facilities. Ulin as a Type A Hospital. Obstacles are mainly commitment and understanding in the use of antibiotics as well as the management in terms of support and active roles.

The conclusion of the substance of PPRA at Ulin Banjarmasin Hospital has referred to the regulations applicable in the 1945 Constitution, various laws and regulations including the Health Law, and technical regulations in the form of regulations of the minister of health. It needs to be evaluated and revised referring to the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 28 of 2021. Implementation is still not optimal, so it is necessary to carry out socialization and education continuously and continuously. Facilities, infrastructure and periodic evaluation of antibiotic use guidelines are needed

Keywords: Antimicrobial resistance control program, guidelines for the use of antibiotics